



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA/NAGARI (ADD/N)
SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022**



**SARILAMAK
TAHUN 2022**



SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA/NAGARI
(ADD/N) SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Bupati menetapkan rincian dan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa/ Nagari (ADD/N) setiap Nagari;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong potensi Nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sesuai dengan misi 3 (tiga) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka perlu didukung oleh aspek pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang bersumber dari Alokasi Dana Desa/ Nagari (ADD/N);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) setiap Nagari Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 12);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 152);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 27);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA/NAGARI (ADD/N) SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal-usul Nagari diwilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disebut RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disebut BUMNag, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
10. Alokasi Dana Desa/Nagari, selanjutnya disingkat ADD/N, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk nagari berdasarkan variable yang telah ditetapkan.

11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal ADD/N yang akan diterima oleh setiap Nagari secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran ADD/N yang dibagi dengan jumlah nagari secara kabupaten.
12. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada nagari yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Nagari, angka kemiskinan Nagari, luas wilayah Nagari, dan tingkat kesulitan geografis Nagari setiap kabupaten/kota.
14. Indeks Kesulitan Geografis Nagari yang selanjutnya disebut IKG Nagari adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Nagari berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
17. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban APB Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Barang Milik Nagari adalah kekayaan milik Nagari berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Nagari, yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
21. Pengadaan barang/jasa Nagari yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Nagari, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

22. Swakelola pengadaan barang/jasa di nagari adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh Pelaksana Teknis Kegiatan;
23. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatan yang dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
24. Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk Program Jaminan Kesehatan.
25. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN SERTA PRINSIP

Pasal 2

Maksud diberikannya ADD/N adalah untuk kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari, serta untuk membantu membiayai program Pemerintahan Nagari dan percepatan pembangunan Nagari sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala nagari yang dimiliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari.

Pasal 3

Tujuan diberikannya ADD/N adalah :

- a. mendanai penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, pemberdayaan masyarakat nagari;

- b. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- e. meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat nagari;
- f. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- g. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat nagari dan pemberdayaan masyarakat;
- h. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- i. meningkatkan pelayanan pada masyarakat nagari dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- j. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- k. meningkatkan pendapatan nagari dan masyarakat nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag);
- l. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan nagari;
- m. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- n. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan nagari;
- o. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat; dan
- p. meningkatkan pelayanan masyarakat nagari dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Sasaran ADD/N adalah :

- a. sasaran lokasi ADD/N adalah seluruh nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota; dan

- b. Sasaran penggunaan ADD/N adalah untuk mendanai penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari, penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, pemberdayaan masyarakat nagari, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak nagari, pemberian tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, operasional pemerintah nagari, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Nagari.

Pasal 5

Prinsip ADD/N adalah :

- a. ADD/N dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali;
- b. Keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga masyarakat nagari tanpa ada perbedaan;
- c. pengelolaan ADD/N merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Nagari dalam APB Nagari;
- d. kegiatan yang didanai oleh ADD/N direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Nagari dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari; dan
- e. pengelolaan ADD/N sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD/N dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) Besaran ADD/N Tahun Anggaran 2022 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah sebesar Rp. 70.058.786.900,- (Tujuh puluh milyar lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah).

BAB III
PENETAPAN RINCIAN ADD/N
Bagian Kesatu
Perhitungan

Pasal 7

- (1) Pengalokasian dan pembagian ADD/N ditetapkan atas dasar Pagu Alokasi Dasar (PAD) ditambah dengan Pagu Alokasi Berdasarkan Formula (PABF).
- (2) Besaran PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD/N Kabupaten setelah dikurangi penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat nagari serta tunjangan Bamus Nagari, yang dibagi secara merata kepada seluruh nagari.
- (3) Besaran PABF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD/N Kabupaten, setelah dikurangi penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat nagari serta tunjangan Bamus Nagari, dibagi secara proporsional kepada seluruh nagari berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dengan pembobotan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 45% (empat puluh lima perseratus);
 - b. jumlah penduduk miskin dengan bobot 3% (tiga perseratus);
 - c. luas wilayah dengan bobot 51,75% (lima puluh satu koma tujuh lima perseratus);
 - d. Indeks Kesulitan Geografis nagari dengan bobot 0,25% (nol koma dua puluh lima perseratus).

Pasal 8

- (1) Besaran ADD/N yang diterima oleh masing-masing nagari dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADD/N}_x = \text{AD}_x + \text{AF}_x + \text{SILTAP WN \& PERANGKAT}$$

x = Nama Nagari.

ADD/N_x = Alokasi Dana Desa untuk Nagari x.

AD_x = Alokasi Dasar yang diterima Nagari x.

AF_x = Alokasi berdasarkan Formula yang diterima Nagari x.

- (2) Besaran ADx dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini :

$$AD x = \frac{(ADD/N - SILTAP) \times 60\%}{n}$$

- ADD/N = Alokasi Dana Desa/Nagari Total dari Kabupaten/APBD.
 ADx = Alokasi Dasar yang diterima Nagari x.
 Siltap = Penghasilan Tetap/Gaji Wali Nagari + Perangkat Nagari serta Tunjangan Bamus.
 n = Jumlah Nagari se-Kab. Lima Puluh Kota.

- (3) Besarnya AFx setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :

- a. Alokasi berdasar Formula untuk setiap nagari = (Alokasi Dana Desa/Nagari Kabupaten – Siltap) x 40% [(45% x rasio jumlah penduduk + 3% x rasio jumlah penduduk miskin + 51,75% X rasio luas wilayah + 0,25% X rasio Indeks Kesulitan Geografis)]
- b. Perhitungan Rasio dan Bobot Bagian Alokasi Berdasarkan Formula (AF) setiap nagari adalah sebagai berikut :

- a) Rasio jumlah penduduk (Rasio JP), dengan rumus :

Rasio Jumlah Penduduk	= $\frac{\text{Jumlah Penduduk Nagari}}{\text{Total Penduduk Nagari di Kabupaten}}$
-----------------------------	---

B

- Bobot Jumlah Penduduk Nagari (Bobot JPx), dengan rumus :

$$\text{Bobot JPx} = 45\% \times \text{Rasio JP.}$$

- b) Rasio jumlah Penduduk Miskin (Rasio JPM), dengan rumus :

Rasio Jumlah Penduduk Miskin	= $\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Nagari}}{\text{Total Penduduk Miskin di Kabupaten}}$
---------------------------------------	--

B

Bobot jumlah penduduk miskin nagari (Bobot JPMx), dengan rumus :

$$\text{Bobot JPMx} = 3\% \times \text{Rasio JPM.}$$

c) Rasio luas wilayah (Rasio LW), dengan rumus :

Rasio LW	= $\frac{\text{Luas Wilayah Nagari}}{\text{Total Luas Wilayah Nagari di Kabupaten}}$
----------	--

Bobot Luas Wilayah (Bobot LW), dengan rumus :

$$\text{Bobot LW} = 51,75\% \times \text{Rasio LW.}$$

d) Rasio IKG, dengan rumus :

Rasio IKG	= $\frac{\text{IKG Nagari}}{\text{Total IKG di Kabupaten}}$
-----------	---

Bobot IKG Nagari , dengan rumus :

$$\text{Bobot Jumlah IKG Kabupaten} = 0,25\% \times \text{Rasio IKG.}$$

d) Total bobot setiap Nagari, dengan rumus :

$$\text{Total Bobotx} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JP} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG.}$$

e) Alokasi berdasarkan Formula setiap nagari, dengan rumus :

$$\text{Alokasi Formula Nagari (AFx)} = \text{Total Bobotx} \times \text{Pagu Alokasi Berdasarkan Formula.}$$

Bagian Kedua

Pengalokasian dan Pembagian ADD/N

Pasal 9

Pengalokasian dan pembagian ADD/N untuk setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGUNAAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Penggunaan

Pasal 10

- (1) ADD/N dielokasikan untuk penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari, operasional pemerintahan nagari, Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari, serta pelaksanaan program dan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pembinaan kemasyarakatan serta bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak nagari serta premi kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Premi atau iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengalokasian penggunaan ADD/N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat nagari, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis, serta mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD/N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), antara lain sebagai berikut :
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari dibagi dalam sub bidang :
 1. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Nagari;
 2. sarana dan prasarana pemerintahan Nagari;
 3. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 4. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 5. pertanahan.
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari dibagi dalam sub bidang :
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;

3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. kawasan permukiman;
 5. kehutanan dan lingkungan hidup;
 6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 7. energi dan sumber daya mineral; dan
 8. pariwisata.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dibagi dalam sub bidang :
1. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 2. kebudayaan dan kegamaan;
 3. kepemudaan dan olah raga; dan
 4. kelembagaan masyarakat.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dibagi dalam sub bidang :
1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian dan peternakan;
 3. peningkatan kapasitas aparatur Nagari;
 4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 6. dukungan penanaman modal; dan
 7. perdagangan dan perindustrian.
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari dibagi dalam sub bidang :
1. penanggulangan bencana;
 2. keadaan darurat; dan
 3. keadaan mendesak.
- (2) Penggunaan ADD/N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah nagari dan tercantum dalam APB Nagari.

Pasal 12

Kegiatan yang dilarang dibiayai dari ADD/N adalah :

- a. pembangunan, rehab/pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang bukan menjadi urusan atau kewenangan pemerintah nagari.

- b. talangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- c. tidak dijadikan sebagai sumber swadaya untuk kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

Pelaksanaan program, kegiatan yang bersumber dari ADD/N dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa/pengelolaan keuangan nagari.

Pasal 14

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan ADD/N.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD/N.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 15

- (1) Pengadaan barang/jasa pelaksanaan kegiatan ADD/N dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah nagari setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Tata cara pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan ADD/N mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di desa/nagari.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan/ penyerapan ADD/N kepada Bupati cq. Kepala Badan Keuangan Kabupaten melalui Camat secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan/penyerapan keuangan ADD/N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format dalam aplikasi resmi Pemerintah merupakan alat bantu berbasis Sistem Informasi dan mencakup :
 - a. Uraian program dan kegiatan nagari;
 - b. jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan
 - c. laporan realisasi perkembangan penggunaan ADD/N.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD/N terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Nagari.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa/nagari.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dengan berkoordinasi secara teknis bersama Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari dan bantuan keuangan kepada Nagari.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa/Nagari yang dikoordinasikan dengan APIP.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD/N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten dan/atau oleh institusi atau lembaga atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD/N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan ADD/N untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak nagari, wajib di informasikan secara transparan dan dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan ADD/N wajib di publikasikan kepada seluruh masyarakat nagari melalui sarana informasi publik di nagari seperti:
 - a. *website*;
 - b. papan informasi; dan
 - c. baliho.
- (3) Sarana informasi publik dimaksud ayat (2) adalah tempat-tempat yang menjadi pusat perkumpulan masyarakat nagari seperti kantor Wali Nagari, Balai Adat Nagari dan di Jorong-jorong serta tempat-tempat strategis lainnya.
- (4) Informasi tentang penggunaan ADD/N sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari pelayanan Pemerintah Nagari dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat Nagari atas akses informasi terhadap pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

BAB VIII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada nagari yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADD/N sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bupati berhak memberikan sanksi kepada nagari yang tidak memenuhi ketentuan asas pengelolaan keuangan nagari dan pengelolaan ADD/N sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati berhak dan dapat mengurangi jumlah ADD/N pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional diterima, dan/atau menunda penyaluran ADD/N bagi nagari yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan ADD/N secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (4) Pelanggaran terhadap pengelolaan keuangan nagari dan penyimpangan penggunaan ADD/N diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 26 Januari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

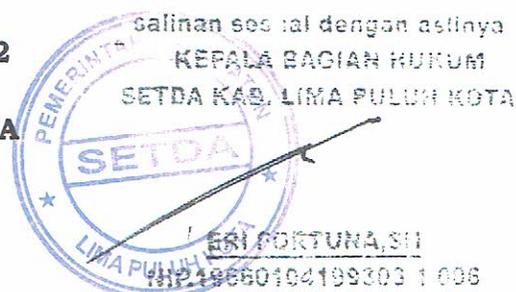
ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

**Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 26 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

ttd

**WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022 NOMOR 3**



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 26 JANUARI 2022

TENTANG : PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA
DESA/NAGARI (ADD/N) SETIAP NAGARI TAHUN
ANGGARAN 2022

KODE		NAMA KECAMATAN/NAMA NAGARI	JUMLAH ADD/N (Rp)
1	2	3	4
01	-	SULIKI	4.579.550.700
	01	Kurai	670.271.200
	02	Sungai Rimbang	804.660.700
	03	Tanjung Bungo	691.454.300
	04	Suliki	891.161.600
	05	Limbanang	797.409.000
	06	Andiang	724.593.900
02	-	GUGUAK	4.459.452.200
	01	Guguak VIII Koto	1.075.682.800
	02	Tujuh Koto Talago	980.345.600
	03	Sungai Talang	798.702.700
	04	Kubang	888.954.200
	05	Simpang Sugiran	715.766.900
03	-	PYAKUMBUH	5.586.107.500
	01	Koto Baru Simalanggang	823.168.900
	02	Taeh Bukik	798.628.000
	03	Simalanggang	786.748.400
	04	Sungai Baringin	739.210.000
	05	Piobang	713.132.500
	06	Taeh Baruah	970.547.100
	07	Koto Tengah Simalanggang	754.672.600
04	-	LUAK	3.878.301.200
	01	Tanjung Haro Sikabu-Kabu Pdg Pjg	827.155.600
	02	Mungo	1.103.387.900
	03	Sungai Kamuyang	1.039.587.400
	04	Andaleh	908.170.300
05	-	HARAU	9.643.363.100
	01	Taram	1.066.496.500
	02	Solok Bio-Bio	774.821.100
	03	Tarantang	791.486.000
	04	Bukik Limbuku	712.749.300
	05	Harau	996.104.000
	06	Batu Balang	899.972.400
	07	Sarilamak	1.303.887.700
	08	Gurun	709.191.500
	09	Lubuak Batingkok	741.295.900
	10	Koto Tuo	954.176.900
	11	Pilubang	693.181.800
06	-	PANGKALAN KOTO BARU	6.414.541.300
	01	Manggilang	861.511.400
	02	Tanjung Balik	945.035.800
	03	Gunuang Malintang	1.531.051.700
	04	Pangkalan	1.327.718.500
	05	Koto Alam	837.607.000
	06	Tanjung Pauah	911.616.900

KODE		NAMA KECAMATAN/NAMA NAGARI	JUMLAH ADD/N (Rp)
1	2	3	4
07	-	KAPUR IX	6.912.282.300
	01	Muaro Paiti	993.193.100
	02	Koto Bangun	958.566.500
	03	Lubuak Alai	1.054.149.600
	04	Koto Lamo	951.081.000
	05	Durian Tinggi	859.346.400
	06	Sialang	1.105.467.600
	07	Galugua	990.478.100
08	-	GUNUANG OMEH	2.749.837.300
	01	Pandam Gadang	953.270.000
	02	Koto Tinggi	1.123.450.600
	03	Talang Anau	673.116.700
09	-	LAREH SAGO HALABAN	7.353.186.300
	01	Labuah Gunuang	866.015.400
	02	Batu Payuang	905.646.900
	03	Ampalu	1.020.240.700
	04	Bukik Sikumpa	683.232.300
	05	Balai Panjang	907.551.700
	06	Halaban	1.050.854.800
	07	Tanjuang Gadang	814.086.300
	08	Sitanang	1.105.558.200
10	-	SITUJUAH LIMO NAGARI	4.066.289.100
	01	Situjuh Batua	877.589.200
	02	Situjuh Ladang Laweh	644.456.700
	03	Tungka	819.983.400
	04	Situjuh Banda Dalam	887.975.700
	05	Situjuh Gadang	836.284.100
11	-	MUNGKA	4.075.831.600
	01	Jopang Manganti	621.050.700
	02	Simpang Kapuak	963.380.800
	03	Mungka	932.536.700
	04	Talang Maua	761.626.900
	05	Sungai Antuan	797.236.500
12	-	BUKIK BARISAN	4.898.013.200
	01	Maek	1.326.920.000
	02	Banja Loweh	898.574.900
	03	Baruah Gunuang	1.012.840.700
	04	Sungai Naniang	802.448.500
	05	Koto Tengah	857.229.100
13	-	AKABILURU	5.442.031.100
	01	Sariak Laweh	931.064.100
	02	Koto Tengah Batu Hampar	971.122.500
	03	Batu Hampar	781.741.200
	04	Suayan	777.894.200
	05	Sungai Balantiak	659.695.600
	06	Pauh Sangik	667.988.300
	07	Durian Gadang	652.525.200
JUMLAH TOTAL			70.058.786.900

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

Ditetapkan di : Sarilamak
 Pada Tanggal 26 Januari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

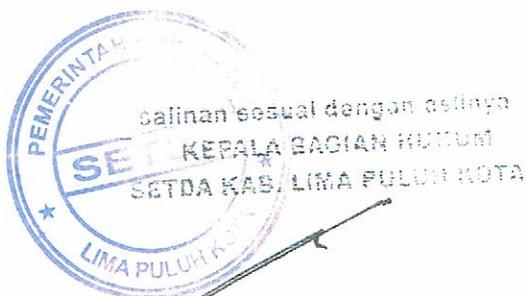
SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO



Format Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari

KODE REKENING	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
	Pendapatan Asli Nagari			
	Hasil Usaha Nagari			
	Hasil Aset Nagari			
	dst			
	Pendapatan Transfer			
	Dana Desa			
	Alokasi Dana Desa/Nagari			
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			
	Bantuan Keuangan			
	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah			
	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN			
	BELANJA			
	Belanja Nagari			
	Belanja Pegawai			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Modal			
	Belanja Tak Terduga			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS/ (DEFISIT)			
	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan			
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran			
	Pengeluaran Pembiayaan			
	Penyertaan Modal			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

..... 20
 Wali Nagari



ERIK PORTUNA, S.I
 NIP.196601041993001006

Ditetapkan di : Sarilamak
 Pada Tanggal 26 Januari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO